

Integrasi Pendidikan Bela Negara dalam Penguatan Ketahanan Pangan Sektor Peternakan sebagai Strategi Pertahanan Nonmiliter

Deriel Kurniawan¹, Revitia Thalita Salsabila², dan Gabriel Khoirul Huga³

¹Badiklat Kemhan, derielkurniawan73@gmail.com

²Badiklat Kemhan, revitya@gmail.com

³Badiklat Kemhan, irulhuga@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi membawa tantangan baru terhadap sistem pertahanan negara melalui ancaman non-militer seperti ketergantungan ekonomi dan krisis pangan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara ketahanan pangan sektor peternakan dan pendidikan bela negara sebagai strategi pertahanan non-militer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif, penelitian ini membandingkan kasus Indonesia (Aceh Utara, Lampung Selatan, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur) dengan kasus internasional (Tunisia, Aljazair, Rusia-Ukraina). Unit analisis penelitian meliputi kebijakan ketahanan pangan peternakan Indonesia, program pemberdayaan peternakan lokal seperti Desa Tangguh Pangan, inisiatif TNI dalam pemberdayaan peternakan rakyat, serta kasus krisis ketahanan pangan internasional. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional (FAO, World Bank, European Commission), dan artikel jurnal periode 2011-2025. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman menunjukkan bahwa internalisasi nilai bela negara berkontribusi terhadap penguatan karakter kemandirian, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Temuan menunjukkan sektor peternakan dapat diposisikan sebagai infrastruktur pertahanan non-militer. Hasil komparasi menunjukkan pendekatan Indonesia yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan nilai bela negara memiliki keunggulan signifikan dibandingkan respons Tunisia dan Aljazair yang bersifat reaktif dengan subsidi darurat tanpa pembangunan kapasitas domestik, serta berbeda dengan respons Eropa yang tetap bergantung pada mekanisme pasar global. Ketahanan pangan berbasis peternakan merupakan implementasi konkret bela negara pada era ancaman multidimensional.

Kata Kunci : pendidikan bela negara, ketahanan pangan, sektor peternakan, pertahanan nonmiliter, kedaulatan pangan.

ABSTRACT

Globalization has introduced new challenges to national defense systems through non-military threats such as economic dependencies and food crises. This study analyzes the relationship between livestock food security and national defense education as a non-military defense strategy. Employing a qualitative approach with comparative case study method, this research compares Indonesian cases (North Aceh, South Lampung, Kalimantan, East Nusa Tenggara) with international cases (Tunisia, Algeria, Russia-Ukraine). The units of analysis include Indonesia's livestock food security policies, local livestock empowerment programs such as Desa Tangguh Pangan, TNI initiatives in people's livestock empowerment, and international food security crisis cases. Data were collected through analysis of official government documents, international agency reports (FAO, World Bank, European Commission), and journal articles from 2011-2025. Analysis using the Miles and Huberman model demonstrates that internalization of national defense values contributes to strengthening self-reliance character, solidarity, and collective responsibility in maintaining food security. Findings indicate that the livestock sector can be positioned as non-military defense infrastructure. Comparative results show that Indonesia's approach, which integrates community empowerment with national defense values, demonstrates significant advantages over Tunisia and Algeria's reactive responses with emergency subsidies without domestic capacity building, and differs from Europe's response that remains dependent on global market mechanisms. The study reveals that Indonesia's bottom-up approach transforms communities from passive consumers into active actors with collective responsibility for national food sovereignty. Livestock-based food security represents concrete implementation of national defense in the era of multidimensional threats.

Keywords: national defense education, food security, livestock sector, non-military defense, food sovereignty.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah mempercepat transformasi di berbagai sektor kehidupan manusia, baik di Indonesia maupun di negara lain. Keterbukaan akses antarnegara melalui perdagangan, pertukaran informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, hingga interaksi sosial-budaya menciptakan peluang besar bagi kemajuan bangsa. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, globalisasi juga membawa tantangan baru terhadap sistem pertahanan negara. Pada era modern ini, imperialisme tidak lagi diwujudkan semata-mata melalui kekuatan militer atau perang bersenjata, melainkan melalui strategi yang lebih halus seperti *proxy war* yang memanfaatkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan pangan sebagai instrumen tekanan (Cook & Nair, 2021; Kennedy, 2023).

Salah satu bentuk ancaman non-militer yang semakin krusial adalah kerentanan terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan dan keberlangsungan suatu negara, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kerapuhan dalam sistem pangan berpotensi memicu instabilitas sosial, memperlemah perekonomian, serta mengganggu keamanan nasional. Bahkan, ketahanan pangan yang lemah dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal untuk menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik yang pada akhirnya melemahkan kedaulatan bangsa (Metrouh, 2025; Steichen, 2021).

Untuk memahami ketahanan pangan secara komprehensif, pandangan internasional menegaskan bahwa *food security* tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas dari waktu ke waktu (FAO, 2008). Penekanan pada dimensi stabilitas juga diperkuat oleh *World Bank* yang menggarisbawahi bahwa faktor cuaca buruk, ketidakstabilan politik, serta tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan dapat secara signifikan memengaruhi status ketahanan pangan suatu negara (World Bank, 2025). Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan isu multidimensional yang berkaitan erat dengan keamanan nasional.

Dalam konteks ini, sektor peternakan memegang peran strategis dalam menjaga

ketahanan pangan nasional. Produk pangan hewani seperti daging, telur, dan susu merupakan sumber protein utama yang sangat vital untuk mendukung kesehatan dan produktivitas masyarakat. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sektor ini masih menghadapi tantangan serius. (Swardana, 2020) mengungkapkan bahwa meskipun permintaan terhadap produk hewani terus meningkat, kemampuan produksi dan distribusi peternak kecil dalam memenuhi kebutuhan tersebut masih terbatas. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan dan pemberdayaan yang tepat, berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional.

Selain keterbatasan kapasitas produksi, ketergantungan terhadap impor pakan dan bibit unggul turut memperbesar kerentanan nasional terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan negara pengekspor (Udayani et al., 2020). Persaingan pasar global melalui mekanisme perdagangan bebas juga menyebabkan produk peternakan lokal semakin sulit bersaing, terlebih ketika masyarakat lebih memilih produk impor dibandingkan hasil produksi dalam negeri. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya konsumsi produk lokal turut memperlemah kemandirian pangan nasional. Situasi ini membuka peluang bagi pihak luar untuk menjadikan sektor pangan sebagai instrumen tekanan politik maupun ekonomi terhadap negara (Abu Hatab et al., 2021; Fedorov et al., 2021).

Kerapuhan sistem pangan nasional semakin tampak nyata ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Gangguan pada rantai pasok global menghambat distribusi dan logistik produk peternakan (Crespo & Felipe, 2024; Sekaran et al., 2021). Ketergantungan terhadap impor daging sapi, terutama dari Australia dan India, memperburuk kondisi hingga pasokan pangan nasional menurun drastis di bawah proyeksi kebutuhan (Swardana, 2020). Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di sektor peternakan memiliki implikasi strategis, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam konteks kedaulatan dan pertahanan negara. Sebagai contoh konkret, pada tahun 2025 Kodim 0103/Aceh Utara mengelola peternakan ayam petelur dengan produksi 70–75 butir telur per hari, yang menunjukkan bahwa inisiatif skala lokal mampu berkontribusi nyata terhadap ketersediaan pangan sekaligus pemberdayaan

masyarakat (Tay, 2025).

Dalam kerangka pertahanan negara, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari konsep bela negara. Pemahaman tentang bela negara perlu diperluas, tidak semata-mata dalam pengertian militeristik, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif seluruh warga negara dalam menjaga dan memperkuat sektor-sektor vital, termasuk pangan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oleh karena itu, pendidikan bela negara perlu mengakomodasi aspek kemandirian pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer (Latuheru & Khamim Zarkasih, 2025). Kesadaran masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya melalui penguatan sektor peternakan lokal, merupakan salah satu wujud nyata praktik bela negara di era ancaman multidimensional.

Dari perspektif pendidikan, penguatan kesadaran bela negara melalui ketahanan pangan peternakan harus mampu menumbuhkan karakter warga negara yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara, yang menegaskan bahwa setiap warga negara perlu dibina melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pengabdian agar memiliki sikap, perilaku, dan kemampuan bela negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme. Pendidikan Bela Negara, dengan demikian, dapat menjadi instrumen strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang terintegrasi dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga sumber daya pangan lokal.

Kajian-kajian terdahulu mengenai ketahanan pangan umumnya berfokus pada dimensi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan pedesaan (Salasa, 2021; Siregar & Tulus, 2021). Sementara itu, studi tentang pendidikan bela negara cenderung menekankan pada pembentukan ideologi, wawasan kebangsaan, dan kesadaran pertahanan dalam konteks militeristik (Saputra et al., 2022). Meskipun kedua bidang kajian ini memiliki relevansi terhadap ketahanan nasional, keterkaitan langsung antara ketahanan pangan khususnya di sektor peternakan dengan pendidikan bela negara sebagai instrumen

pertahanan non-militer masih jarang ditelaah secara sistematis. *Research gap* ini menunjukkan perlunya kajian integratif yang mampu menghubungkan dimensi ketahanan pangan peternakan dengan pendidikan bela negara dalam kerangka strategi pertahanan nasional yang komprehensif. Studi komparatif terhadap kasus-kasus domestik dan internasional yang mengalami krisis ketahanan pangan juga masih terbatas, padahal perbandingan tersebut dapat memberikan pembelajaran strategis mengenai bagaimana integrasi nilai bela negara dapat memperkuat resiliensi sistem pangan nasional.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menghadirkan *novelty* ilmiah melalui tiga kontribusi utama. Pertama, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan ketahanan pangan sektor peternakan dengan pendidikan bela negara sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer, sesuatu yang belum dikaji secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan kasus-kasus domestik (Aceh Utara, Lampung Selatan, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur) dengan kasus internasional (Tunisia, Aljazair, Rusia-Ukraina), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola kerentanan pangan peternakan dan relevansinya dengan konsep bela negara. Ketiga, penelitian ini menawarkan kontribusi praktis berupa model integrasi pendidikan bela negara dalam penguatan sektor peternakan yang dapat diadopsi dalam kebijakan pertahanan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas horizon konseptual bela negara dari pendekatan militeristik menuju pendekatan yang lebih holistik dan multidimensional, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi pengembangan strategi pertahanan non-militer yang adaptif terhadap tantangan ketahanan pangan di era globalisasi.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran ketahanan pangan peternakan dalam mendukung pertahanan nasional; (2) membandingkan kasus-kasus domestik dan internasional yang mencerminkan keterkaitan antara ketahanan pangan dan pendidikan bela negara; serta (3) merumuskan kerangka konseptual integrasi ketahanan pangan

peternakan dalam pendidikan bela negara sebagai salah satu pilar pertahanan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif (*comparative case study*) untuk mengkaji hubungan antara Pendidikan Bela Negara dan ketahanan pangan sektor peternakan sebagai bentuk pertahanan nonmiliter. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan (Creswell, 2014). Desain studi kasus komparatif digunakan untuk membandingkan pola-pola kerentanan pangan peternakan dan respons kebijakan antara kasus domestik (Indonesia) dengan kasus internasional (Tunisia, Aljazair, Rusia-Ukraina), sehingga dapat mengidentifikasi keunggulan komparatif dan pembelajaran strategis bagi penguatan ketahanan pangan nasional.

Objek dan Unit Analisis

Objek penelitian adalah integrasi pendidikan bela negara dalam penguatan ketahanan pangan sektor peternakan sebagai strategi pertahanan non-militer. Unit analisis penelitian meliputi: (1) kebijakan ketahanan pangan peternakan di Indonesia; (2) program pemberdayaan peternakan lokal seperti Desa Tangguh Pangan di wilayah Aceh Utara, Lampung Selatan, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur; (3) inisiatif TNI dalam pemberdayaan peternakan rakyat; serta (4) kasus krisis ketahanan pangan internasional di Tunisia (2011), Aljazair (2011), dan dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap ketahanan pangan Eropa (2022).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi (*document analysis*) terhadap sumber-sumber sekunder yang kredibel dan relevan. Sumber data meliputi: (1) dokumen resmi pemerintah Indonesia (kebijakan, peraturan, laporan program); (2) laporan lembaga internasional seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*), World Bank, dan European Commission; (3) artikel jurnal ilmiah yang telah

melalui proses *peer review*; serta (4) berita daring dari media kredibel yang memuat informasi aktual mengenai implementasi program ketahanan pangan peternakan. Periode data yang dikumpulkan mencakup tahun 2011 hingga 2025 untuk memastikan cakupan historis yang memadai dalam menganalisis dinamika ketahanan pangan peternakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2024) yang terdiri dari tiga tahap: (1) reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari berbagai sumber dokumentasi untuk memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data (*data display*), yaitu penyusunan data yang telah direduksi ke dalam format tabel komparatif, matriks, atau narasi sistematis untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar variabel; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu interpretasi temuan berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi dan verifikasi melalui triangulasi sumber data.

Teknik Analisis Komparatif

Analisis komparatif dilakukan melalui pendekatan *cross-case analysis* dengan membandingkan karakteristik, respons kebijakan, dan dampak krisis ketahanan pangan antara kasus domestik Indonesia dengan kasus internasional. Kerangka perbandingan meliputi dimensi: (1) sumber kerentanan ketahanan pangan peternakan; (2) jenis respons pemerintah (reaktif vs proaktif; subsidi vs pemberdayaan); (3) keterlibatan masyarakat dalam penguatan sektor peternakan; serta (4) integrasi nilai bela negara dalam strategi ketahanan pangan. Perbandingan sistematis ini memungkinkan identifikasi keunggulan komparatif pendekatan Indonesia yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan nilai bela negara, berbeda dengan pendekatan Tunisia, Aljazair, dan Eropa yang cenderung reaktif dan bergantung pada mekanisme pasar.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan kualitas data kualitatif, penelitian ini menerapkan beberapa strategi

validitas dan reliabilitas. Validitas data dijaga melalui: (1) triangulasi sumber (*data source triangulation*), yaitu penggunaan berbagai sumber data (dokumen pemerintah, laporan internasional, jurnal ilmiah, media kredibel) untuk memverifikasi konsistensi informasi; (2) member checking, yaitu konfirmasi interpretasi data terhadap dokumen resmi dan laporan yang dipublikasikan; serta (3) **thick description*, yaitu penyajian deskripsi kontekstual yang kaya dan mendalam untuk meningkatkan transferabilitas temuan. Reliabilitas data dijaga melalui: (1) dokumentasi sistematis terhadap proses pengumpulan dan analisis data; (2) penggunaan protokol analisis yang konsisten berdasarkan model Miles dan Huberman; serta (3) audit trail yang memungkinkan penelusuran kembali

terhadap keputusan analitis yang diambil selama proses penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Perbandingan Kasus Krisis Ketahanan Pangan Peternakan

Analisis komparatif terhadap kasus domestik dan internasional menunjukkan pola kerentanan ketahanan pangan peternakan yang bervariasi. Tabel 2 menyajikan perbandingan sistematis antara kasus Tunisia, Aljazair, konflik Rusia-Ukraina, dan Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Kasus Krisis Ketahanan Pangan Peternakan

Aspek	Tunisia (2011)	Aljazair (2011)	Eropa (Rusia-Ukraina 2022)	Indonesia (2020-2025)
Pemicu Krisis	Kenaikan harga pangan 20-30% dalam waktu singkat	Kenaikan harga pangan 20-30% akibat fluktuasi global	Gangguan pasokan pupuk dan pakan ternak akibat konflik	Gangguan rantai pasok global saat pandemi COVID-19
Sumber Kerentanan	Ketergantungan tinggi terhadap impor gandum dan pangan pokok	Ketergantungan impor bahan pangan pokok	Ketergantungan pada pasokan pupuk dan pakan dari Rusia-Ukraina	Ketergantungan impor sapi bakalan, daging sapi, dan bahan baku pakan
Dampak Sosial-Politik	Demonstrasi massal, gejala politik nasional	Protes massal, ketidakstabilan sosial	Kenaikan drastis harga daging dan susu di seluruh Eropa	Penurunan pasokan pangan di bawah proyeksi kebutuhan
Respons Pemerintah	Kebijakan subsidi harga, impor darurat (reaktif)	Subsidi harga, impor darurat (reaktif)	Peningkatan subsidi peternak, diversifikasi sumber impor	Pemberdayaan peternakan lokal berbasis masyarakat (proaktif)
Pembangunan Kapasitas Domestik	Tidak ada perubahan struktural produksi domestik	Tetap bergantung impor, tidak ada penguatan produksi lokal	Belum ada penguatan signifikan kemandirian peternakan lokal	Program Desa Tangguh Pangan, pengelolaan peternakan oleh TNI
Integrasi Nilai Bela Negara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada - melalui pembinaan kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab kolektif
Pendekatan Strategis	Top-down, berbasis mekanisme pasar	Top-down, berbasis subsidi dan pasar	Diversifikasi pasar tanpa penguatan kapasitas lokal	Bottom-up, partisipasi masyarakat sebagai aktor aktif
Ketahanan Jangka Panjang	Rentan - masih bergantung impor	Rentan - masih bergantung impor	Rentan - belum mandiri	Resilient - membangun kemandirian struktural

Temuan Empiris Program Pemberdayaan Peternakan di Indonesia

Analisis terhadap program pemberdayaan peternakan lokal di Indonesia menunjukkan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan

pemberdayaan masyarakat:

1. Kodim 0103/Aceh Utara (2025): Pengelolaan peternakan ayam petelur menghasilkan produksi 70-75 butir telur per hari, menunjukkan bahwa inisiatif

- skala lokal mampu berkontribusi terhadap ketersediaan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat (Tay, 2025).
2. Program Desa Tangguh Pangan di Lampung Selatan, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur: Program ini mengintegrasikan penguatan peternakan rakyat dengan pembinaan kesadaran bela negara, tidak hanya meningkatkan kemandirian pangan masyarakat lokal tetapi juga memperkuat ekonomi wilayah sekaligus menegaskan kehadiran negara di kawasan strategis (Adesogan et al., 2020).
 3. Dampak terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Penelitian (Adesogan et al., 2020) membuktikan bahwa peternak sapi potong dengan sistem produksi mandiri memiliki tingkat ketahanan pangan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan peternak dengan sistem gaduhan.

Keunggulan Komparatif Pendekatan Indonesia

Berdasarkan analisis komparatif, pendekatan Indonesia menunjukkan tiga keunggulan utama:

1. Pembangunan Kapasitas Berbasis Masyarakat: Berbeda dengan Tunisia dan Aljazair yang mengandalkan subsidi reaktif, Indonesia membangun kapasitas produksi melalui pemberdayaan langsung peternak lokal.
2. Integrasi Nilai Bela Negara: Pendekatan Indonesia unik karena mengombinasikan penguatan ekonomi dengan pembinaan kesadaran kebangsaan, menciptakan tanggung jawab kolektif terhadap kedaulatan pangan.
3. Pendekatan Bottom-Up: Masyarakat diposisikan sebagai aktor aktif, bukan sekadar konsumen pasif atau penerima subsidi seperti kasus negara-negara pembanding.

PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan Peternakan sebagai Pilar Pertahanan Non-Militer

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa ketahanan pangan memiliki korelasi langsung

dengan stabilitas nasional. Secara konseptual, *food security* harus mencakup empat dimensi utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas (World Bank, 2025). Keempat dimensi tersebut harus terpenuhi secara bersamaan agar tujuan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal. Kegagalan dalam salah satu dimensi akan berimplikasi pada kerentanan sistem pangan secara keseluruhan.

(Adesogan et al., 2020) menegaskan bahwa ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan merupakan faktor pendukung kesiapsiagaan nasional karena berkaitan langsung dengan ketahanan fisik, sosial, dan moral masyarakat, termasuk personel militer. Ketahanan pangan yang kokoh menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa, mengurangi risiko konflik sosial, serta memperkuat stabilitas nasional. Oleh sebab itu, pangan dapat dikategorikan sebagai elemen strategis dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks pertahanan negara, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas gizi, serta stabilitas ketersediaannya dalam jangka panjang (Ali, 2024). Ancaman terhadap pertahanan tidak lagi semata datang dari agresi militer, tetapi juga dari ancaman nonmiliter seperti krisis pangan, ketergantungan impor, dan tekanan ekonomi global. Globalisasi dan dinamika geopolitik telah memperluas bentuk ancaman menjadi lebih kompleks, di mana kontrol terhadap sektor pangan dapat digunakan sebagai instrumen dominasi antarnegara.

Pentingnya sektor peternakan dalam kerangka pertahanan nasional tidak dapat diabaikan. Sektor ini berfungsi sebagai penyedia utama protein hewani yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan ketangguhan sumber daya manusia. (Saputra et al., 2022) menyebutkan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista), tetapi juga oleh kesiapan logistik dasar, terutama penyediaan pangan yang memadai bagi seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, sektor peternakan dapat dikategorikan sebagai bagian dari infrastruktur strategis pertahanan nasional yang menopang keberlangsungan energi manusia dan stabilitas sosial.

Pembelajaran dari Krisis Pangan Global

Implikasi ketahanan pangan terhadap stabilitas nasional dapat diamati melalui berbagai peristiwa global. Krisis pangan di Tunisia pada tahun 2011, yang dipicu oleh kenaikan harga pangan sebesar 20-30 persen dalam waktu singkat, memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang tatanan politik nasional. Fenomena serupa terjadi di Aljazair, di mana lonjakan harga pangan mendorong munculnya aksi protes massal. Di sisi lain, perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 menyebabkan terganggunya pasokan pupuk dan pakan ternak di kawasan Eropa, sehingga berdampak pada melonjaknya harga daging dan susu di berbagai negara (European Commission, 2022).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa gangguan terhadap sistem pangan, termasuk di sektor peternakan, memiliki korelasi langsung dengan instabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional. FAO menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan faktor politik, ekonomi, dan keamanan. (Pinstrup-Andersen, 2009) bahkan menyebut pangan sebagai "senjata strategis", karena kelangkaannya dapat menjadi pemicu konflik, instabilitas, bahkan disintegrasi sosial.

Keunggulan Pendekatan Indonesia: Integrasi Bela Negara dalam Ketahanan Pangan

Perbandingan sistematis antara kondisi di Indonesia dengan kasus-kasus internasional mengungkapkan dinamika yang berbeda. Tunisia dan Aljazair merespons krisis melalui kebijakan subsidi harga dan impor darurat yang bersifat reaktif, tanpa disertai pembangunan kapasitas produksi pangan domestik jangka panjang. Negara-negara Eropa pasca-konflik Rusia-Ukraina merespons dengan meningkatkan subsidi kepada peternak dan mencari sumber alternatif impor, namun tetap bergantung pada mekanisme pasar global tanpa penguatan signifikan pada kemandirian produksi lokal berbasis partisipasi masyarakat.

Kondisi Indonesia menunjukkan tantangan struktural serupa namun dengan respons yang berbeda secara fundamental. Berbeda dengan pendekatan Tunisia, Aljazair, dan negara-negara Eropa yang lebih mengandalkan mekanisme pasar, subsidi harga, dan impor alternatif, Indonesia mengembangkan strategi pemberdayaan peternakan lokal yang terintegrasi

dengan kesadaran bela negara. Pemerintah Indonesia bersama TNI mengimplementasikan program pembangunan kapasitas produksi berbasis masyarakat yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab kolektif terhadap kedaulatan pangan.

Pendekatan Indonesia yang mengombinasikan strategi *bottom-up* berbasis partisipasi masyarakat dengan pembinaan nilai bela negara menunjukkan keunggulan komparatif. Keunggulan ini terletak pada kemampuan mengombinasikan pendekatan pertahanan teritorial dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di sektor peternakan, sesuatu yang tidak ditemukan dalam respons Tunisia, Aljazair, maupun negara-negara Eropa terhadap krisis pangan mereka.

Transformasi Paradigma: Dari Komoditas Ekonomi ke Infrastruktur Pertahanan

Berdasarkan sintesis pada Tabel 1 (yang sudah ada di jurnal asli), tampak transformasi signifikan dalam pemahaman peran sektor peternakan. Jika sebelumnya peternakan dipandang semata sebagai komoditas ekonomi, kini terbukti sebagai infrastruktur strategis pertahanan nonmiliter. Keunggulan pendekatan Indonesia yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan nilai bela negara mencerminkan evolusi konseptual yang fundamental.

Integrasi nilai bela negara dalam penguatan sektor peternakan menjadi pembeda fundamental strategi Indonesia. Berbeda dengan pendekatan negara lain yang bersifat teknis-ekonomis dan reaktif, Indonesia menggabungkan penguatan kapasitas produksi dengan pembinaan nilai kebangsaan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan peternakan lokal, yang tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi tetapi juga memperkuat pilar pertahanan nasional.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam memperluas konsep bela negara dari pendekatan militeristik menuju pendekatan yang lebih holistik dan multidimensional. Bela negara tidak lagi terbatas pada kesiapsiagaan militer, tetapi meluas menjadi partisipasi aktif seluruh warga dalam menjaga ketahanan pangan

sebagai fondasi pertahanan nasional yang tangguh dan berdaulat.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan model integrasi pendidikan bela negara dalam penguatan sektor peternakan yang dapat diadopsi dalam kebijakan pertahanan dan pembangunan nasional. Model ini mencakup tiga ranah utama: (1) pengetahuan teknis peternakan; (2) literasi pangan dan gizi; serta (3) nilai bela negara dan kewirausahaan yang mendorong kemandirian ekonomi dan kesadaran tanggung jawab sosial terhadap ketahanan pangan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap kasus domestik dan internasional, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab tujuan penelitian:

Pertama, sektor peternakan terbukti memiliki peran strategis dalam mendukung pertahanan nasional sebagai infrastruktur pertahanan non-militer. Analisis terhadap kasus menunjukkan pola konsisten bahwa gangguan pada sistem pangan peternakan dapat memicu instabilitas sosial dan politik yang mengancam keamanan nasional. Krisis pangan yang dipicu kenaikan harga 20-30 persen di Tunisia dan Aljazair membuktikan korelasi langsung antara kerentanan pangan dengan gejolak politik, sementara konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bagaimana gangguan pasokan pupuk dan pakan ternak dapat mengguncang stabilitas regional Eropa. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan pangan peternakan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan variabel kritis dalam arsitektur pertahanan nasional.

Kedua, perbandingan sistematis menunjukkan keunggulan komparatif signifikan pendekatan Orang dibandingkan respons Tunisia, Aljazair, dan negara-negara Eropa. Berbeda dengan pendekatan reaktif yang mengandalkan subsidi harga, impor darurat, dan diversifikasi sumber impor tanpa pembangunan kapasitas domestik, Orang mengembangkan model pemberdayaan peternakan berbasis partisipasi masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan bela negara. Program konkret seperti pengelolaan peternakan oleh Kodim 0103/Aceh Utara (70-75 butir telur/hari) dan Desa Tangguh Pangan di Lampung Selatan, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur membuktikan bahwa

pendekatan *bottom-up* mampu membangun kemandirian struktural, bukan sekadar mengatasi gejala krisis sesaat. Keunggulan ini terletak pada transformasi masyarakat dari konsumen pasif menjadi aktor aktif yang memiliki tanggung jawab kolektif terhadap kedaulatan pangan nasional.

Ketiga, integrasi nilai bela negara dalam penguatan sektor peternakan terbukti mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan sebagai bentuk konkret pembelaan negara. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman menunjukkan bahwa internalisasi nilai bela negara berkontribusi terhadap penguatan karakter kemandirian, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Temuan empiris dari penelitian (Pinstrup-Andersen, 2009) memperkuat argumentasi bahwa peternak dengan sistem produksi mandiri memiliki tingkat ketahanan pangan rumah tangga yang lebih tinggi, mengonfirmasi bahwa kemandirian peternakan berdampak langsung terhadap stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas konsep bela negara dari pendekatan militeristik menuju pendekatan holistik yang mencakup dimensi ketahanan pangan peternakan sebagai strategi pertahanan non-militer. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integrasi yang mencakup tiga ranah utama: (1) pengetahuan teknis peternakan (manajemen pakan, kesehatan hewan, pengelolaan limbah ramah lingkungan); (2) literasi pangan dan gizi (peran protein hewani, diversifikasi pangan); serta (3) nilai bela negara dan kewirausahaan (kemandirian ekonomi, partisipasi aktif, tanggung jawab sosial terhadap ketahanan pangan nasional).

Keunggulan model Indonesia yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan nilai kebangsaan menegaskan bahwa ketahanan pangan berbasis peternakan merupakan wujud nyata implementasi bela negara pada era ancaman multidimensional. Berbeda dengan respons Tunisia dan Aljazair yang tetap bergantung pada impor dan subsidi tanpa perubahan struktural, atau Eropa yang masih mengandalkan mekanisme pasar global, Indonesia membangun sistem yang lebih *resilient* melalui sinergi antara pertahanan teritorial dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di

sektor peternakan. Model integrasi ini dapat diadopsi dalam kebijakan pertahanan dan pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdaulat dalam menghadapi tantangan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hatab, A., Krautscheid, L., & Boqvist, S. (2021). Covid-19, livestock systems and food security in developing countries: A systematic review of an emerging literature. *Pathogens*, 10(5), 1–19. <https://doi.org/10.3390/pathogens10050586>
- Adesogan, A. T., Havelaar, A. H., McKune, S. L., Eilittä, M., & Dahl, G. E. (2020). Animal source foods: Sustainability problem or malnutrition and sustainability solution? Perspective matters. *Global Food Security*, 25(May 2019). <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.100325>
- Ali, I. I. (2024). The Role of Agroecology in Food Security in Developing Countries. *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches*, 9(9), 455–462.
- Cook, A., & Nair, T. (2021). *Non-traditional Security In The Asia-Pacific: A Decade Of Perspectives*. World Scientific Publishing Company. <https://books.google.co.id/books?id=dqQeEAAQBAJ>
- Crespo, H., & Felipe. (2024). *Food Initiatives by FARC Ex-Combatants: Promoting Peacebuilding and Strengthening Urban-Rural Linkages in Colombia*. <https://doi.org/0.60504/ffjwp.2024.13.108684>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC
- European Commission. (2022). *EU agriculture: Impacts of Russia's invasion of Ukraine on food security and supply chains*. Publications Office of the European Union.
- FAO. (2008). *An introduction to the basic concepts of food security*. EC-FAO Food Security Programme. https://www.foodsec.org/docs/concepts_guide.pdf
- Fedorov, V., Bunchikov, O., & Kapelist, E. (2021). Assessment of agricultural business activities and its contribution to the formation of food security of the country. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 937(3). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/937/3/032081>
- Kennedy, P. S. J. (2023). The Problem of Food Security in the Indonesia Border Area of Nusa Tenggara Timur Province with Timor Leste Country. *KnE Social Sciences*, 2023, 167–177. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13329>
- Latuheru, S. C., & Khamim Zarkasih. (2025). Mewujudkan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 557–565. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.52084>
- Metrouh, L. (2025). *Food Security and International Security : An Analytical View from the Perspective of*. 20–27.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food security: definition and measurement. *Food Security*, 1(1), 5–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12571-008-0002-y>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Paradigm and Dimensions of Indonesia's Food Security Strategy. *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 13, N(1), 35–48. <https://e-journal.unair.ac.id/JAP/article/download/29357/15488>
- Saputra, O. I., Darmawan, W. B., & Dermawan, W. (2022). Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i1.38866>
- Sekaran, U., Lai, L., Ussiri, D. A. N., Kumar, S., & Clay, S. (2021). Role of integrated crop-livestock systems in improving agriculture

- production and addressing food security – A review. *Journal of Agriculture and Food Research*, 5, 100190. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jafr.2021.100190>
- Siregar, A. Z., & Tulus, Y. (2021). Integrasi padi merah dan ternak lembu mendukung ketahanan pangan di Tapanuli Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(1), 35–43.
- Steichen, L. E. (2021). *The Insidious Nature Of Defense: Military-Conservation Alliances In The United States*. 32(3), 167–186.
- Swardana, A. (2020). Optimalisasi Lahan Pekarangan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Krisis Pangan di Masa Pandemi Covid-19. *Jagros : Jurnal Agroteknologi Dan Sains (Journal of Agrotechnology Science)*, 4(2), 246. <https://doi.org/10.52434/jagros.v4i2.922>
- Udayani, N. M. L., Susiatiningsih, H., & Dir, A. A. B. (2020). Ketergantungan Negara terhadap Pasar Internasional dalam Mencapai Ketahanan Pangan (Dengan fokus perbandingan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 227–241. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.3478.227-241>
- World Bank. (2025). *What is food security?* World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update/what-is-food-security>